

EKONOMI HIJAU PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK: RELEVANSI DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Ajeng Kartika Galuh¹, Asfi Manzilati², Sri Muljaningsih³

^{1,2,3}Universitas Brawijaya, Malang-Indonesia

Email Korespondensi: ajenggaluh@ub.ac.id

ABSTRACT

This research aims to investigate the relevance and implementation of the concepts of green economy and political economy in Indonesia through analysis of literature studies. The concept of a green economy emphasizing sustainable and environmentally friendly economic growth is becoming increasingly relevant amid the challenges of climate change and environmental degradation faced by Indonesia. Meanwhile, political economy is a key theoretical basis in understanding how economic decisions related to green practices are influenced by political, economic and policy factors at the local, national and global levels. Research findings show that there is a gap between concept and implementation in the field. Despite the commitment and efforts made by the government, private sector and civil society to encourage a green economy, there are still challenges in facing conventional economic interests which tend to focus on economic growth without taking environmental impacts into account. The implications of this research are the need for cross-sector collaboration, stronger regulations, investment in green innovation, and increased public awareness as important steps in realizing sustainable and environmentally friendly economic development in Indonesia.

Keywords: Green Economy, Implementation, Political Economy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi dan implementasi konsep ekonomi hijau dan ekonomi politik di Indonesia melalui analisis studi literatur. Konsep ekonomi hijau yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi semakin relevan di tengah tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang dihadapi Indonesia. Sementara itu, ekonomi politik merupakan landasan teori utama dalam memahami bagaimana keputusan ekonomi terkait praktik ramah lingkungan dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan kebijakan di tingkat lokal, nasional, dan global. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep dan implementasi di lapangan. Meskipun terdapat komitmen dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mendorong ekonomi hijau, namun masih terdapat tantangan dalam menghadapi kepentingan ekonomi konvensional yang cenderung berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan dampak lingkungan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya kolaborasi lintas sektor, peraturan yang lebih kuat, investasi pada inovasi hijau, dan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai langkah penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi Hijau, Implementasi, Ekonomi Politik.

PENDAHULUAN

Alam semesta tercipta berjuta-juta tahun lalu untuk terus tumbuh dan berkembang serta menjadi ekosistem yang mendukung eksistensi kehidupan baik secara materiil maupun non-materiil seluruh makhluk hidup di muka bumi. Sebuah statistik menunjukkan bahwa pada tahun 1900, populasi manusia di dunia sekitar 1.65 miliar (Homer-Dixon, 1999). Pada 2004 terjadi peningkatan empat kali lipat total

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

populasi dunia sejak tahun 1900, dimana populasi manusia sekitar 6 miliar (Islam, 2004). Selanjutnya data PBB (2022) menunjukkan populasi manusia mencapai angka 8 miliar. Angka tersebut dianggap telah jauh melampaui daya tampung bumi jika dikombinasikan dengan konsumsi bahan dan energi per kapita yang jauh lebih tinggi untuk menghasilkan pasokan atau ketersediaan energi global. Atlas Keadilan Lingkungan mendokumentasikan sekitar 3000 konflik lingkungan dalam berbagai fase konflik di seluruh dunia (Dunlap, 2022).

Berbagai temuan kondisi ekologis, seperti kondisi kesuburan tanah di bumi mengalami degradasi 40%, terdapat penurunan 83% biomassa cacing tanah, penipisan 85% stok ikan global, berkurangnya setengah populasi mamalia di bumi, dan timbulnya 'zona mati' akibat dari limpasan kimia, nitrogen, dan penyebaran fosfor di sepanjang garis pantai kawasan industri di seluruh dunia telah menunjukkan bumi sedang menghadapi krisis ekologis yang serius (Dunlap, 2022). Krisis ekologis juga ditandai dengan adanya deforestasi yang telah berada pada titik tertinggi sepanjang masa akibat kebakaran hutan, cuaca yang tidak menentu, rekor gelombang panas (mengakibatkan kematian manusia dan makhluk hidup lainnya), dan banjir yang menyebar ke seluruh dunia dengan naiknya permukaan laut (Hickel, 2020).

Di Indonesia, sekitar 27.7 juta hektar tutupan hutan telah hilang dari tahun 2001 hingga 2019 yang sebagian besar disebabkan oleh alih fungsi lahan guna budidaya komoditas perkebunan monokultur dan pertambangan (Green Peace Indonesia & INDEF, 2021). Menjadi sebuah keniscayaan, bahwa timbulnya krisis ekologis ini berdampak pada lini-lini perekonomian di berbagai negara di dunia. Sebagaimana data yang disampaikan oleh Green Peace Indonesia & INDEF (2021), di tahun 2019 sekitar US\$ 44 triliun dari nilai ekonomi global atau setara dengan setengah Produk Domestik Bruto di tingkat global dihasilkan dari pemanfaatan alam. Banyak sumber-sumber alam yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi telah hilang. Masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan terkena dampak negatif dari polusi air dan udara. Kesempatan-kesempatan untuk kemajuan ekonomi dan sosial terbagi tidak merata. Berbagai masalah yang timbul pada dimensi lingkungan dan sosial, pada dasarnya tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui sistem ekonominya dalam memproduksi barang dan jasa (Hanley, 2001). Maka, tak ada satu negara pun yang dapat mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan yang terpisah sendiri. Sebaliknya, negara perlu mengakui saling ketergantungan yang tak terbantahkan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan hidup dan kemajuan sosial.

Antara pembangunan ekonomi dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan, seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan ekonomi selain memiliki dampak positif, juga memiliki dampak negatif. Faktanya, dari segi positif pembangunan ekonomi telah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendongkrak pendapatan nasional. Namun jika dilihat dari sisi negatif pembangunan ekonomi juga dapat berdampak terjadinya deplesi sumberdaya alam akibat eksploitasi berlebihan, pencemaran tanah, air, dan udara akibat polusi industri, banjir, serta berdampak pada terjadinya perubahan iklim (*climate change*). Dari sudut pandang ini menimbulkan satu pertanyaan, apakah *trade off* antara pembangunan ekonomi dan kepentingan menjaga kelestarian alam dan lingkungan merupakan keniscayaan? Pembangunan ekonomi merupakan ranah strategis yang harus senantiasa dibangun dan dikembangkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kendatipun demikian, perlu disadari bahwa dengan maraknya pembangunan perekonomian dewasa ini sebagai tuntutan kebutuhan, justru memunculkan masalah yang cukup dilematis, yaitu menyangkut ketidakseimbangan antara pembangunan perekonomian pada satu sisi dan pelestarian alam dan lingkungan di sisi lain.

Fenomena menurunnya kualitas sumber daya alam, terjadinya kerusakan lingkungan secara masif, polusi, banjir dan semakin luasnya lahan kritis, merupakan bukti dari dampak pembangunan ekonomi yang tidak sejalan dengan pelestarian alam dan lingkungan. Menghadapi tantangan besar ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) salah satunya melalui strategi ekonomi hijau. Dalam konteks ekonomi politik, penguatan perlindungan terhadap penciptaan lingkungan yang baik, tanpa adanya political will yang kuat dalam mewujudkannya, maka hanya

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

akan menjadi diskursus yang tidak mempunyai kekuatan di tingkat publik.

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang berlimpah, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga lingkungan alamnya. Analisis ekonomi politik ekonomi hijau di Indonesia penting untuk memahami bagaimana keputusan ekonomi dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan kebijakan dalam konteks keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya beragam kepentingan politik dan ekonomi di Indonesia, terdapat konflik dan dinamika yang dapat mempengaruhi implementasi praktik ekonomi hijau. Analisis ini dapat mengungkap bagaimana kepentingan berbagai pihak berinteraksi dan memengaruhi kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia juga yang terlibat dalam ekonomi global, keputusan ekonomi di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar, seperti persyaratan internasional dan investasi asing. Analisis ekonomi politik terkait implementasi ekonomi hijau perlu mempertimbangkan dinamika global dan lokal yang saling terkait. Hasil analisis diharapkan memberi pemahaman tentang bagaimana kebijakan dan keputusan ekonomi dapat mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sesuai dengan visi keberlanjutan Indonesia untuk masa depan yang lebih baik.

METODE

Fokus penelitian ini adalah analisis terkait relevansi konsep ekonomi hijau dan ekonomi politik serta implementasinya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sebagai landasan untuk menyelidiki hubungan antara kebijakan ekonomi hijau dan faktor-faktor politik yang mempengaruhinya di Indonesia. Studi literatur yang dilakukan akan mencakup analisis berbagai sumber yang mencakup analisis berbagai penelitian, laporan, dan publikasi terkait penerapan konsep ekonomi hijau dan ekonomi politik di Indonesia yang relevan untuk memahami dinamika perubahan kebijakan, tantangan implementasi, serta potensi solusi dalam mengadopsi praktik ekonomi hijau di Indonesia.

PEMBAHASAN

Ekonomi dan Lingkungan Hidup

Paradigma hubungan antara lingkungan dan pengembangan ekonomi dalam pandangan Bank Dunia (1994), bahwa pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik merupakan aspek yang saling melengkapi, Dimana tanpa perlindungan lingkungan yang memadai, pembangunan akan terhambat dan perlindungan lingkungan akan menurun. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola secara benar dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pandangan Bank Dunia tersebut juga menyatakan bahwa perlindungan atas kelestarian sumber daya alam dengan proporsi penggunaan yang tepat akan mendorong pembangunan (ekonomi) pada suatu wilayah. Peran ekonomi dalam hal ini, ilmu ekonomi sesungguhnya berkaitan erat dengan lingkungan (sumber daya alam) karena ketersediaannya sumber daya alam itu juga relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan manusia. Sehingga ilmu ekonomi merupakan kajian yang mempelajari tentang bagaimana tingkah laku manusia baik secara perseorangan maupun sebagai masyarakat di mana mereka terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dari berbagai sumber daya alam yang terbatas. Dengan demikian, manusia (masyarakat) harus melakukan pilihan alat pemuas berupa sumber daya alam dan melakukan pilihan di antara kebutuhan yang harus dipenuhi.

Pemilihan sumber daya (lingkungan) untuk memenuhi kebutuhan manusia selalu mempertimbangkan adanya pemuas kebutuhan dengan tujuan untuk memaksimalkan kepuasan maupun produksi baik perseorangan maupun masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya sumber daya yang terbatas sedangkan kebutuhan manusia itu tidak ada batasan maka manusia secara sendiri maupun secara bersama-sama harus berusaha mencapai kepuasan pribadi atau manfaat sosial yang optimal (Habibi, 2005). Hakekatnya, mekanisme pasar (interaksi produsen dan konsumen) dapat membantu menjelaskan relasi fungsional antara pasar dan lingkungan. Implikasi dari saling hubungannya dan kemungkinan untuk memperoleh solusi yang efektif. Terjadinya kerusakan lingkungan dan deplesi sumber daya alam yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksi-governance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

muncul dari kegiatan yang dilakukan produsen dan konsumen. Kedua aktivitas tersebut menimbulkan hasil sampingan yang akan mencemari lingkungan. Pencemaran terjadi dari hubungan antara aktivitas rumah tangga (sebagai pemilik faktor produksi) dan perusahaan (penghasil barang dan jasa).

Persoalan lingkungan penyelesaiannya tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, ketika dalam mekanisme pasar terjadi eksternalitas (dampak terhadap tingkat kesejahteraan pihak ketiga yang timbul karena tindakan seseorang karena tanpa dipungut kompensasi atau pembayaran). Mekanisme pasar cenderung mengabaikan biaya-biaya yang dilakukan oleh perusahaan. Eksternalitas muncul apabila seseorang melakukan suatu kegiatan dan menimbulkan dampak pada orang lain (manfaat eksternal maupun biaya eksternal) yang semuanya tidak memerlukan kewajiban untuk menerima atau melakukan pembayaran. Contohnya pada interaksi jual beli minuman kaleng. Biaya limbah kaleng bekas belum tercermin pada harga minimum kaleng tersebut. Sifat eksternalitas ini menjadi salah satu merosotnya fungsi lingkungan.

Pada 2008, United Nations Environment Programme (UNEP) mencetuskan konsep Ekonomi Hijau, yang selanjutnya diselaraskan dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disahkan pada 25 September 2015 oleh 193 perwakilan dari berbagai negara. Konsep ekonomi hijau merujuk pada pendekatan pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Konsep ini menekankan pentingnya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta memperhitungkan aspek keberlanjutan dalam setiap keputusan ekonomi yang diambil. Dengan kata lain, hal ini berkaitan dengan upaya menyelaraskan bisnis dan pembangunan infrastruktur dengan pengurangan emisi gas rumah kaca, mengekstraksi dan menggunakan lebih sedikit sumber daya alam, serta mengurangi limbah dan memperkecil kesenjangan sosial. Pendekatan ini diharapkan dapat tercipta model pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi manusia dan lingkungan (UNEP, 2011). Maka, ruang lingkup pertumbuhan hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi pada rasional pemanfaatan modal alam, mencegah dan mengurangi polusi, dan menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan dengan membangun ekonomi hijau, dan akhirnya tercapai pembangunan berkelanjutan. Dengan beberapa pendapat mengenai Ekonomi Hijau di Indonesia, dapat ditarik kerangka antara lain ekonomi berkelanjutan, ekosistem yang sehat sekaligus produktif, pertumbuhan ekonomi yang merata dan kokoh.

Implementasi Ekonomi Hijau di Indonesia

Pada awalnya, konsep ekonomi hijau mungkin belum begitu populer di Indonesia. Fokus utama mungkin lebih pada pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang serius. Seiring dengan meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan, Indonesia mulai memperkenalkan konsep-konsep ekonomi hijau. Hal ini melibatkan lebih banyak pemikiran tentang perlunya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Perkembangan ekonomi hijau di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke beberapa dekade terakhir di mana kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan semakin meningkat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Indonesia juga dihadapkan pada masalah lingkungan yang serius, seperti deforestasi, pencemaran udara dan air, serta degradasi lahan.

Pada tahun 1990-an, Indonesia mulai mengadopsi beberapa kebijakan pro lingkungan seperti moratorium deforestasi, program konservasi hutan, dan pengembangan energi terbarukan. Namun, baru pada awal abad ke-21, konsep ekonomi hijau mulai diperkenalkan secara lebih serius dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk penerapan pajak karbon, insentif bagi industri ramah lingkungan, dan program pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah Indonesia juga mulai mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang mendukung ekonomi hijau, seperti program-program keberlanjutan lingkungan, insentif pajak, dan program-program pengurangan emisi gas rumah

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

kaca. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan peningkatan kesadaran akan dampak perubahan iklim, pemerintah dan sektor swasta di Indonesia semakin fokus pada pembangunan ekonomi hijau. Investasi dalam energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan teknologi hijau lainnya telah menjadi prioritas dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Inovasi juga semakin mendorong implementasi konsep-konsep ekonomi hijau di Indonesia. Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti konflik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan, sejarah perkembangan ekonomi hijau di Indonesia menunjukkan adanya komitmen dan langkah-langkah konkret dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Selain juga terdapat tantangan dalam mengubah paradigma ekonomi tradisional, ada juga peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam penerapan ekonomi hijau di tingkat lokal, regional, dan global. Evolusi konsep dan implementasi ekonomi hijau di Indonesia adalah proses yang terus berkembang dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, investasi swasta, dan peran masyarakat sipil.

Selama 25 tahun terakhir, tingkat pertumbuhan Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Dalam sekitar dua dekade terakhir (1998—2022), nilai tengah atau median pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5,03% (Ahdiat, 2023). Indonesia telah menjadi negara berpendapatan menengah dan masuk ke dalam kelompok negara-negara ekonomi utama atau G20. Tapi keberhasilan ekonomi ini memiliki dampak ekonomi dan sosial. Laporan The Environmental Performance Index (EPI) 2022 yang dilakukan oleh lembaga penelitian Yale Center for Environmental Law & Policy dan Center for International Earth Science Information Network Earth Institute Columbia University menyatakan Indonesia mendapat peringkat bawah mengenai keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Menurut laporan tersebut, pelestarian lingkungan Indonesia tergolong buruk di skala global (peringkat ke-164 dari 180 negara yang diriset). Di skala regional Asia Pasifik, Indonesia mendapat peringkat ke-22 dari 25 negara Asia Pasifik atau peringkat ke-8 dari 10 negara ASEAN.

Laporan EPI 2022 terklasifikasi dalam tiga pilar penilaian, yakni: 1) daya hidup ekosistem (kualitas biodiversitas, keberlanjutan perikanan, pertanian, sumber daya air), 2) kesehatan lingkungan (kualitas udara, pencemaran air, kualitas pengolahan limbah), dan 3) perubahan iklim (kebijakan mitigasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca). Sumber data EPI 2022 berasal dari berbagai organisasi internasional, lembaga penelitian, akademisi, dan lembaga pemerintah untuk menganalisis keberlanjutan lingkungan di 180 negara di dunia. Indikator-indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa dekat negara-negara yang disurvei terhadap pemenuhan target keberlanjutan yang telah disepakati secara internasional terkait isu-isu lingkungan tertentu. Dalam laporan ini Indonesia mendapat nilai rendah untuk semua indikator, dengan rincian skor daya hidup ekosistem 34,1; skor kesehatan lingkungan 25,3, dan skor kebijakan mitigasi perubahan iklim 23,2. Secara rata-rata keseluruhan, Indonesia mendapat skor 28,2 dari 100. EPI menyatakan skor rendah diterima negara-negara dengan peringkat rendah adalah negara yang sedang menghadapi krisis ataupun perang dan negara-negara yang lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi daripada kelestarian lingkungan.

Bahwasanya, sejak tahun 2015 Indonesia telah mengadopsi Sustainable Development Goals (SDGs). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencetuskan SDGs sebagai panduan bagi seluruh negara anggota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan global yang berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030. Tujuan SDGs mencakup berbagai aspek keberlanjutan pembangunan bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan bagi generasi yang akan datang. Menurut Sustainable Development Report (2022), capaian pembangunan berkelanjutan Indonesia sudah meningkat dalam dua dekade terakhir. Pada tahun 2000 skor indeks SDGs Indonesia 60,53 dari skala 100 atau rata-rata capaian pembangunan Indonesia 60,53% dari seluruh tujuan SDGs.

Pada 2022 skornya perlahan naik hingga mencapai 70,16. Namun demikian, Indonesia masih mendapat label "merah" atau dinilai memiliki "tantangan besar" dalam penanganan masalah kelaparan,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

kesehatan, energi bersih, pelestarian ekosistem laut dan daratan, serta perdamaian, keadilan, dan tata kelola institusi. Kendati demikian, pemerintah Indonesia telah berupaya menerapkan Ekonomi Hijau yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini memungkinkan evaluasi yang lebih holistik terhadap dampak kebijakan ekonomi terhadap kesejahteraan manusia dan lingkungan (Nahman, 2016). Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait isu-isu lingkungan lebih besar dibanding yang dihadapi generasi-generasi sebelumnya. Salah satunya adalah menghadapi efek perubahan iklim yang sudah terasa di seluruh Indonesia dan akan bertambah buruk ke depannya. Selain itu, kesejahteraan manusia untuk mempertahankan hidup pada akhirnya bergantung pada kemampuan alam untuk menyediakan beberapa sumber daya dasar. Manusia mengandalkan air dan udara bersih serta iklim yang cukup baik untuk mendukung kehidupan; tanah, sungai dan laut yang subur dan produktif untuk sumber makanan; sumber mineral dan energi untuk mendorong perekonomian. Dalam dunia di mana sumber daya alam semakin langka, biaya sosial dari polusi dan perubahan iklim semakin meningkat, dan ekosistem yang mendukung kehidupan terancam, keberlanjutan kesejahteraan manusia secara fundamental ikut terancam.

Implementasi Ekonomi Hijau dalam Perspektif Ekonomi Politik

Praktik ekonomi hijau di sebuah negara sangat dipengaruhi faktor politik seperti kepentingan kelompok, dinamika pertarungan kekuasaan, pembentukan kebijakan, dan implementasi regulasi lingkungan dapat membentuk kerangka kerja untuk menggerakkan ekonomi hijau (Fardian dkk, 2021). Menurut Kroll & Zipperer (2020), dalam konteks ekonomi hijau, teori ekonomi politik juga menyoroti peran kepentingan ekonomi dan kekuasaan dalam pembentukan kebijakan ekonomi. Kepentingan sektor ekonomi tertentu, kelompok industri, dan pemangku kepentingan lainnya dapat bertentangan dengan tujuan-tujuan lingkungan yang lebih luas. Pada level pemerintahan juga memungkinkan adanya perubahan struktural sebagai respons terhadap tekanan ekonomi, politik, dan sosial. Perubahan ini menyiratkan terjadinya transisi ke ekonomi yang lebih berkelanjutan bisa terwujud melalui interaksi kompleks antara aktor-aktor ekonomi dan politik (North, 1990). Pertimbangan ekonomi politik tentang pembagian sumber daya dan distribusi kekuasaan juga relevan dalam konteks ekonomi hijau. Implementasi praktik-praktik ekonomi hijau bisa mempengaruhi pembagian sumber daya dan keuntungan di masyarakat, serta keseimbangan kekuasaan antara berbagai aktor di dalamnya.

Implementasi ekonomi hijau dalam perspektif ekonomi politik mengalami perkembangan yang menarik. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan perlunya tindakan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, banyak negara dan organisasi mulai mengadopsi kebijakan ekonomi hijau. Dalam konteks ekonomi politik, hal ini sering kali melibatkan perdebatan antara kepentingan ekonomi konvensional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan finansial, dengan kebutuhan untuk memperhitungkan dampak lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kekuatan politik memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi hijau. Hal ini meliputi interaksi antara aktor politik, partai politik, dan lembaga pemerintah yang memiliki kepentingan berbeda terkait dengan ekonomi hijau. Negosiasi politik dapat memengaruhi penentuan prioritas kebijakan, alokasi sumber daya, dan implementasi praktik hijau (Clapp, 2005).

Kepentingan ekonomi yang beragam juga memengaruhi bagaimana keputusan ekonomi terkait dengan praktik hijau dibuat dan dilaksanakan. Di satu sisi, sektor industri dan bisnis mungkin memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, masyarakat sipil, LSM lingkungan, dan kelompok advokasi juga memainkan peran penting dalam mendorong kebijakan ekonomi hijau. Berbagai kepentingan dan motif menimbulkan dinamika kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi praktik ekonomi hijau. Hal ini termasuk adopsi peraturan lingkungan, insentif fiskal, kerjasama lintas batas, dan standar internasional yang memengaruhi cara di mana keputusan ekonomi terkait dengan praktik hijau dijalankan.

Perkembangan implementasi ekonomi hijau di Indonesia dapat dilihat dari upaya-upaya regulasi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

pemerintah, insentif fiskal, investasi dalam teknologi ramah lingkungan, dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Sementara itu, tekanan dari masyarakat dan aktivis lingkungan juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi arah kebijakan ekonomi hijau. Secara keseluruhan, perkembangan implementasi ekonomi hijau dalam perspektif ekonomi politik menunjukkan adanya pergeseran menuju sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, meskipun tetap dihadapkan pada berbagai tantangan dan konflik kepentingan.

KESIMPULAN

Implementasi ekonomi hijau di Indonesia dalam perspektif ekonomi politik telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui kebijakan-kebijakan seperti moratorium deforestasi, program pengembangan energi terbarukan, dan insentif bagi industri berbasis lingkungan. Namun, dalam konteks ekonomi politik, implementasi ekonomi hijau di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Misalnya, adanya konflik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pelestarian lingkungan, serta masalah korupsi dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kapasitas, serta perbedaan pandangan di antara pemangku kepentingan juga menjadi hambatan dalam mendorong implementasi ekonomi hijau. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk memperkuat implementasi ekonomi hijau di Indonesia melalui kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan adanya kesadaran yang semakin meningkat akan pentingnya keberlanjutan lingkungan, diharapkan implementasi ekonomi hijau di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan perekonomian negara.

REFERENSI

- Ahdiat, Adi. *Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, dari Era Habibie sampai Jokowi*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/14/laju-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-era-habibie-sampai-jokowi>. Desember 2023.
- Akhtar, M. R. *Toward Islamic Approach for Environmental Balance*. *Islamic Economic Studies*, Vol. 3 No. 2. 1996.
- Arifin, A. M. *Islamic Eco-Ethics: Ideal Philosophical Base to Implement Green Economy in Indonesia*. MPRA Paper No. 61437. <https://mpra.ub.unimuenchen.de/61437/>. 2013.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut*. Sensus Penduduk 2013. Badan Pusat Statistik. <http://sp2010.bps.go.id/>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2019.
- Clapp, Jeniver, and Peter Dauvergne. *Paths to a Green World the Political Economy of the Global Environment*. Cambridge UK: The MIT Press. 2005.
- Fardian, M.I., Hariyati, Y., Diartha, H.C., dan Priyono, T.H. *A Theoretical Framework in Environment Improvement Policy: A Multidisciplinary Approach*. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 18620–18637. Retrieved from <http://annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/8353>. 2021.
- Fauzi, Hasan, Svensson, dan Goran, Azhar. *Triple Bottom Line as Sustainable Corporate Performance: A Proposition for the Future*. *Sustainability*, 2: 1345-1360. 2010.
- Habibi, A. *Trade off Kerusakan SDA dan Pembangunan Ekonomi*, <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/210>. 2010.
- Hartati AY. *Lingkungan Hidup dan Liberalisasi Perdagangan: Upaya Mencari Jalan Tengah*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol 11 No. 2 November 2017.
- Islam, M. M. *Toward a Green Earth: An Islamic Perspective*. *Asian Affairs*, Vol 26 No. 4, October-December 2004.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

- Jeffrey A. Frangkel. *The Environment and Economic Globalization*, dalam Michael M. Weistein (ed), *Globalization: What's New*. Columbia University Press. 2005.
- Kamali, M. H. *Environmental Care in Islam: A Quranic Perspective*. Proceeding Environment in Islam, 15th General Conference, 27-29 /9 2010: 7-30. 2010.
- Kasztelan, Armand. *Green Growth, Green Economy and Sustainable Development: Terminological and Relational Discourse*. Prague Economic Papers Vol. 26 No. 4, 487-499 p. 2017.
- Kroll, C., & Zipperer, V. *The Political Economy of the Sustainable Development Goals (SDGs): Does Performance on the SDGs Affect Re-Election?*. Sustainability 2020, 12(16), 6445; <https://doi.org/10.3390/su12166445>. 2020.
- Makmun. *Green Economy: Konsep, Implementasi dan Peran Kementerian Keuangan*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol 19, No 2 (2011).
- Marsuki, Mohd Zuhdi. *Religious Agendas Towards Sustainable Development: An Islamic Perspective*. Malaysia Journal of Science and Technological Studies, June 2012: 33.
- Maryunani. *Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pembangunan Ekonomi Secara Berkelanjutan*. Malang: UB Press. 2018.
- Mitchell, Bruce, B. Setiawan, dan Dwita Hadi Rahmi. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2000.
- Nahman, A., Brian K. Mahumani & Willem J. de Lange. *Beyond GDP: Towards a Green Economy Index*. Development Southern Africa, Vol. 33, NO. 2, 215–233. 2016.
- North, DC. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. New York: Cambridge University Press. 1990.
- Pristiandaru, Danur Lambang. *Indonesia Peringkat Bawah dalam Skor Keberlanjutan Lingkungan*. <https://lestari.kompas.com/read/2023/05/15/130000586/indonesia-peringkat-bawah-dalam-skor-keberlanjutan-lingkungan>. 2023.
- Sankar, U. *Environmental Externalities*. <http://coe.mse.ac.in/dp/envt-sanker.pdf>. 2008.
- Soluk, Andrew. *Why we Need to Protect Our Environment*. <http://www.newpolity.com/20i0/i0/2i/why-we-need-to-protect-ourenvironment/>. 2010.
- Tietenberg, Tom. *Environmental and Natural Resources Economics*. United States America: Scott Foresman and Company. 1984.
- Umam, Khairul. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- UNEP. *Environmental Management Accounting Procedures & Principles*. Newyork. 2001
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta Selatan Regency, Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, 1(1), 38-47. 2006.
- Yasa. IGWM. *Ekonomi Hijau, Produksi Bersih dan Ekonomi Kreatif: Pendekatan Pencegahan Resiko Lingkungan Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas di Provinsi Bali*. Jurnal Bumi Lestari, Vol. 10 No. 2 Tahun 2010.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksi@governance@gmail.com/admin@lkispol.or.id